

PENANGGULANGAN TEROR BOM DI INDONESIA

H. Budisantoso S.*)

Sejak tahun 1987 sampai tahun 2004 di Indonesia (di luar NAD Papua dan Maluku) telah terjadi teror bom/ledakan tidak kurang dari 30 kali. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan wilayah yang sangat luas terdiri dari ± 17.000 pulau besar kecil penduduk yang sangat besar jumlahnya yang sebagian besar masih rendah pendidikannya merupakan lahan subur bagi pelaku teror bom. Kondisi ini diperparah oleh belum mantapnya kehidupan demokrasi dan masih adanya ekstrimitas agama serta jumlah pengangguran/kemiskinan rakyat masih besar mengakibatkan banyak peluang bagi teroris untuk menyelinap dan merekrut anggota kelompoknya.

Tujuan dan maksud teror bom tersebut di atas pada umumnya tidak jelas dan siapa pelakunya juga kurang jelas. Namun apabila dianalisa secara lebih mendalam teror bom/ledakan di Indonesia diperkirakan mempunyai motif kepentingan politik yang berasal dari dalam maupun luar negeri kecemburuan dan persaingan ekonomi ekstrimitas agama gangguan terhadap keamanan nasional. Teror bom telah mengakibatkan kerusakan harta benda korban jiwa dan raga serta ketakutan dan trauma penduduk Indonesia termasuk para investor dan wiraswas-tawan manca negara (wisman).

Teror bom juga menimbulkan dampak negatif bagi kegiatan perekonomian dan merosotnya citra pemerintah dan NKRI.

Teror bom merupakan ancaman serius bagi kehidupan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu apa pun motifnya, siapapun pelakunya dan bagaimanapun sulitnya pengawasan terhadap wilayah Indonesia yang luas serta penduduknya yang besar sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 Pemerintah Negara Indonesia harus mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apa yang sudah dilakukan oleh

*) H. Budisantoso S., *Tenaga Ahli Kehormatan dan Widyaswara, Lemhannas Jakarta.*

Pemerintah dan aparat keamanan serta masyarakat dalam menanggulangi teror bom selama ini perlu dikaji ulang secara lebih komprehensif integratif mencakup tindakan preventif persuasif dan represif secara terpadu.

Teror Bom di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya

Sesungguhnya Indonesia sudah sejak tahun 1957 mengalami teror pelemparan granat tangan yang meledak saat Presiden Soekarno hendak meninggalkan Perguruan Cikini Jakarta. Pelaku pelemparan granat adalah anggota DI/TII dapat ditangkap dan diadili. Pada tahun 1984 terjadi ledakan di kantor BCA di Pecenongan dan Glodok Jakarta, kemudian pada tahun 1986 terjadi ledakan di Wisma Metropolitan dan Hotel Presiden Jakarta. Organisasi "Brigade Anti Imperialis Internasional" di Jepang mengaku bertanggung jawab. Pada tahun 1984 dan 1985 terjadi ledakan gereja di Malang bus di Banyuwangi dan candi Borobudur. Pelakunya dari golongan Islam ekstrim dapat ditangkap dan diadili.

Setelah tahun 1985 Pemerintah lebih meningkatkan kemampuannya dalam rangka deteksi dini terhadap gerakan teror meningkatkan kewaspadaan na-

sional serta membentuk satuan penanggulangan teror (Kopassus TNI-AD). Pasukan anti teror ini antara lain berhasil menggagalkan pembajakan pesawat Woyla Garuda Indonesia di Bandara Don Muang Thailand.

Pada tahun 1986 sampai dengan 1995 Indonesia aman dari teror bom. Hal ini diperkirakan karena Indonesia sedang mengalami "booming" pembangunan ekonomi peranan Aparat Intelijen dibantu oleh Aparat Teritorial dalam melaksanakan deteksi dini dan Kewaspadaan Nasional pada waktu itu sangat signifikan. Panglima ABRI Jenderal TNI L.B. Moerdani sangat menekankan perlunya kepekaan Aparat Intelijen. Beliau mengibaratkan apabila ada jarum jatuh Aparat Intelijen harus tahu. Komando Pengendalian terhadap situasi Keamanan Nasional digunakan kewenangan Kopkamtib kemudian secara bertahap dialihkan kepada Pemerintahan Dalam Negeri dibantu oleh Badan Kordinasi Stabilitas Nasional (Bakorstanas) dan Badan Kordinasi Stabilitas Nasional Daerah (Bakorstanasda). Kemudian berdasarkan pertimbangan makin mantapnya stabilitas keamanan Bakorstanas dan Bakorstanasda dilikuidasi.

Setelah menikmati keamanan selama lebih dari 10 tahun bangsa Indonesia didera oleh keru-

suhan massal Mei 1998 yang mengiringi jatuhnya Pemerintahan Orde Baru dan timbulnya gerakan reformasi yang sangat mengedepankan demokratisasi dan hak asasi manusia (HAM). Keamanan dalam negeri menjadi beban tugas Polri, TNI turun tangan bila diminta bantuan oleh Polri atau dalam keadaan darurat sipil/militer/perang.

Pada akhir tahun 1998 dan awal 1999 terjadi ledakan dengan sasaran obyek ekonomi, seperti ATM BCA di Atrium Senen, Pusat Perbelanjaan Ramayana, Mal Kelapa Gading dan Hayam Wuruk Plaza. Dalam peristiwa ledakan tersebut tidak menimbulkan korban tewas.

Pada tahun 2000 terjadi tidak kurang dari tujuh kali teror bom dengan berbagai motif. Juli 2000 terjadi ledakan di Gedung Bundar Kejangung, diperkirakan ada kaitannya dengan pemeriksaan terhadap Tommy Soeharto. Agustus 2000 terjadi ledakan bom mobil di depan rumah Duta Besar Filipina, diperkirakan ada kaitannya dengan gerakan MNLF. Masih pada bulan Agustus 2000 terjadi ledakan granat di lapangan parkir Kedutaan Besar Malaysia. Pada saat yang sama terjadi 2 ledakan berturut-turut di Medan, yaitu di sebuah bengkel dan di pagar rumah Pendeta J. Sitorus. Pada 13 September 2000 terjadi ledakan bom je-

nis *high explosive* berkode RDX mengguncang lantai parkir P2 gedung Bursa Efek di Jakarta, 10 orang tewas, 80 orang lainnya luka berat dan ringan, ratusan mobil rusak berat dan ringan. Pada 27 September 2000 terjadi ledakan yang berasal dari petasan mengguncang kantor Kontras di jalan Mendut, Jakarta, diperkirakan merupakan intimidasi terhadap Kontras. Di Yogyakarta pada bulan Desember 2000 terjadi ledakan di kamar mandi RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta. Kemudian pada Agustus 2001 ledakan bom di rumah Pendeta John Theiri di jalan Cokroaminoto, Yogyakarta. Serangkaian ledakan bom terjadi pada malam Natal 2000 di Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Bandung, Mojokerto, Mataram, Pematangsiantar, Medan, Batam, dan Pekanbaru.

Pada akhir tahun 2001 terjadi tidak kurang dari empat ledakan. Pada tanggal 23 September 2001 terjadi ledakan bom di Plaza Atrium Senen, mengakibatkan enam orang cedera dan kerusakan gedung. Pada tanggal 12 Oktober 2001, terjadi ledakan bom di restoran KFC komplek Pertokoan; Pasar Mirah, Makassar, mengakibatkan kerusakan, tidak ada korban jiwa. Kemudian pada tanggal 6 November 2001 bom rakitan meledak di halaman *Australian International*

School (AIS), tidak menimbulkan korban jiwa. Sebelum itu juga terjadi ledakan bom Molotov dua kali. Pada tanggal 3 Desember 2001 bom rakitan merusak bantalan rel KA di kampung Babakan Maja, Kabupaten Karawang, tidak ada korban jiwa. Sebelumnya pada 17 Maret, sebuah bom meledak di jembatan rel KA di atas sungai Cisadane, Banten, menimbulkan kerusakan berat.

Pada malam Tahun Baru 2002 dinodai dengan beberapa ledakan di sejumlah tempat. Sebuah granat mangga meledak di depan Rumah Makan Bulungan, Jakarta, seorang tewas dan seorang lainnya luka-luka. Di Palu, Sulteng terjadi empat ledakan bom berturut-turut. Ledakan pertama terjadi di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, disusul ledakan di Gereja Pantekosta dan di Gereja Kristen Indonesia (GKI). Ledakan keempat terjadi pada saat sebuah bom dijinakkan. Keempat ledakan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Pada 18 Januari 2002, bom rakitan berdaya ledak rendah meledak di Gardu PLN Cililitan, Jakarta menimbulkan kerusakan pada Gardu PLN, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa.

Diperkirakan sasaran pemboman pada tahun 1999 sampai dengan Januari 2002 bermotif anti Kapitalis dan anti Kristen,

serta sabotase terhadap fasilitas umum untuk mengganggu keamanan umum. Pada umumnya identitas pelaku belum jelas.

Pada 1 Juli 2002 terjadi ledakan berasal dari petasan besar di dekat tangga darurat di basement Pusat Perbelanjaan Graha Cijantung. Ledakan tersebut mengakibatkan dinding dekat tangga jebol, seorang menderita luka bakar, dan enam orang luka ringan. Pelaku teror diidentifikasi sebagai anggota GAM, kemungkinan ledakan ini ditujukan kepada markas Kopassus.

Pada 12 Oktober 2002, tiga ledakan bom mengguncang pulau Bali. Ledakan pertama dan kedua mengguncang kawasan jalan Legian, Kuta. Ledakan ketiga terjadi dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat di Denpasar. Ledakan di kawasan jalan Legian, mengakibatkan Diskotek Sari Club, Diskotek Paddy's, Gedung Panin Bank, habis terbakar dan rumah di sekitarnya rata dengan tanah. Ledakan tersebut mengakibatkan 202 orang tewas yang mayoritas adalah warga negara Australia dan 300 orang lainnya luka-luka. Pada saat yang bersamaan sebuah bom rakitan meledak di pintu gerbang masuk kantor Konsulat Jenderal Filipina di Manado, namun tidak ada korban jiwa. Pelaku peledakan bom di Bali diidentifikasi sebagai kelompok Dr. Azahari

(warga negara Malaysia) dari organisasi Jemaah Islamiah yang kemungkinan ada kaitannya dengan Al Qaeda. Beberapa pelaku berhasil ditangkap antara lain Imam Samodra dan Amrozi, sudah diajukan ke Pengadilan. Dalam hal ini Polri mendapat bantuan dari Polisi Federal Australia. Sasaran ledakan di Bali dan Manado tersebut ditujukan kepada Barat (A.S., Australia dan sekutunya), serta anti kehidupan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti diskotek dan kelab malam, dan lain-lain.

Pada 5 Desember 2002, bom rakitan berkekuatan rendah meledak di restoran McDonald, jalan Sam Ratulangi, Makassar. Ledakan terjadi saat puluhan pengunjung memadati tempat itu untuk buka puasa dan makan malam. Akibat ledakan tersebut, tiga orang tewas dan 11 luka-luka. Pelaku peledakan bom diduga terkait dengan jaringan Moro dan pernah berlatih di Moro, Filipina. Tanggal 3 Februari 2003, bom berkekuatan rendah meledak di lobi Wisma Bha-yangkari, Mabes Polri, Jakarta. Ledakan tersebut menimbulkan kerusakan tetapi tidak ada korban jiwa. Pada 27 April 2003, bom berkekuatan rendah meledak di area publik di Terminal 2F Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng.

Ledakan menyebabkan dua orang luka berat dan delapan orang lainnya luka sedang dan ringan. Kemudian pada 15 Juli 2003, bom berkekuatan rendah, dengan bahan utama bubuk hitam meledak di pusat AC dan pembangkit listrik gedung DPR/MPR, Jakarta. Bom dilengkapi dengan peralatan aki sepeda motor 12 volt, alat pengukur waktu, dan sebuah tabung besi yang berisi paku. Ledakan mengakibatkan lubang di lantai dengan diameter 20 cm dan kedalaman 5 cm, serta melontarkan puluhan paku ke berbagai arah dalam radius 75-85 meter. Ledakan ini tidak mengakibatkan korban jiwa. Ledakan di Bandara Soekarno Hatta dan gedung DPR/MPR diperkirakan dilakukan oleh kelompok teroris separatis anti pemerintah.

Pada 5 Agustus 2003, bom berkekuatan tinggi meledak di depan hotel JW Marriott. Ledakan bom menghancurkan sebagian Hotel JW Marriott termasuk restoran Saelendra. Ledakan mengakibatkan tiga mobil hancur, 11 orang meninggal dunia dan 152 orang lainnya luka-luka. Ledakan ini diperkirakan dilakukan oleh kelompok teroris Dr. Azahari dan Nurdin M. Top.

Pada 10 Januari 2004, empat orang tewas dan belasan luka-luka akibat ledakan bom berdaya ledak rendah di sebuah

kafe di Palopo, Sulawesi Selatan. Ledakan terjadi pada pukul 22.15 WITA, ketika kafe penuh dengan pengunjung. Polda Sulawesi Selatan berhasil meringkus 4 dari 12 tersangka.

Pada 14 Juli 2004, dua bom berskala kecil menggemparkan kota Bandung. Ledakan pertama terjadi di tempat parkir pertokoan Banceuy. Ledakan kedua di depan bekas hotel Braga. Kedua ledakan tidak mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa. Pada 26 Juli 2004, ledakan terjadi di ruang toilet perempuan di sisi barat Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta. Ledakan merusak kaca pintu, cermin di atas wastafel, namun tidak menimbulkan korban jiwa.

Pada 9 September 2004, ledakan di jalan H.R. Rasuna Said di depan Kedutaan Besar Australia, mengakibatkan delapan orang tewas dan 161 luka-luka. Ledakan tersebut juga mengakibatkan kerusakan gedung-gedung di sekitarnya, seperti Plaza 89, Menara Grasia, dan gedung BNI, serta beberapa kendaraan dan sepeda motor hancur. Diduga ledakan ini berasal dari bom mobil bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok teroris Dr. Azahari dan Nurdin M. Top.

Sampai dengan akhir tahun 2004, Aparat Keamanan khususnya Polri terus melakukan usaha menangkap para teroris

dengan penyebaran gambar dan janji hadiah uang. Namun upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan, karena kurangnya partisipasi masyarakat. Hal ini antara lain terbukti Polri hanya dapat menemukan bekas persembunyian para teroris di Jakarta Barat dan di daerah Sukabumi, serta menangkap beberapa kaki tangan Dr. Azahari di daerah Bogor. Sementara itu di daerah Poso, Sulteng, masih terjadi beberapa kali teror pembunuhan dan ledakan bom.

Kecenderungan Tindakan Teror di Berbagai Belahan Dunia

Tindakan teror dalam bentuk pembunuhan politik, pembajakan pesawat dan ledakan bom makin banyak digunakan setelah Perang Dunia II berakhir, digunakan dalam rangka strategi mencapai tujuan tertentu. Pada umumnya tindakan teror digunakan oleh salah satu pihak yang sedang konflik untuk memaksakan kehendaknya terhadap lawannya atau untuk sekedar menunjukkan eksistensinya. Biasanya teror bom digunakan sebagai modus operandi oleh pihak yang lemah dalam menghadapi pihak yang lebih kuat. Dalam hal ini dapat disajikan beberapa kasus sebagai berikut:

1. Kasus Irlandia Utara/Inggris

Penduduk Irlandia Utara terutama yang beragama Katolik ingin melepaskan diri dari Inggris (*Great Britain*) dengan membentuk IRA (Tentara Irlandia) melawan tentara Inggris dengan melakukan perang gerilya. Namun IRA kalah kuat dibandingkan dengan tentara dan polisi Inggris, maka IRA menggunakan teror bom, bukan hanya di Irlandia Utara, tetapi juga sampai di kota London.

Setelah konflik ini dapat diselesaikan di meja perundingan dengan mediator Amerika Serikat, maka teror bom mulai reda dan sampai saat ini tidak terjadi lagi.

2. Kasus Macan Tamil di Ceylon

Gerilyawan Macan Tamil dalam melawan pemerintahan Ceylon (Sri Lanka), bertempur di darat dan di laut, juga menggunakan teror bom di garis belakang medan pertempuran sampai di ibukota Colombo. Teror bom bunuh diri banyak dilakukan oleh para wanita muda yang siap mati sebagai martir.

Pada akhirnya, walaupun perundingan damai belum mencapai hasil yang diinginkan oleh kedua belah pihak, namun teror bom di Sri Lanka sudah jarang terdengar lagi.

3. Gedung WTC New York, Amerika Serikat

Pembajakan pesawat komersial kemudian digunakan untuk menabrak gedung WTC dan gedung Pentagon pada 11 September 2001 merupakan pendadakan yang sangat berhasil dilakukan Al Qaeda di bawah pimpinan Osama bin Laden. Selama ini belum pernah ada pembajakan pesawat komersial yang digunakan untuk berjibaku (jibaku dilakukan oleh pesawat Kamikaze Jepang dalam Perang Dunia II guna menghancurkan kapal perang Amerika Serikat di Lautan Pasifik).

Sebagai negara super power, Amerika Serikat harus membalas. Aliansi setan dituduh sebagai kambing hitam yaitu Al Qaeda dan Saddam Hussein Presiden Irak.

Irak diserang dan digempur oleh Amerika Serikat dan sekutunya tanpa mandat dari PBB, dengan alasan Irak memiliki senjata pemusnah massal. Sampai saat ini sebagian rakyat Irak masih terus mengadakan perlawanan terhadap tentara Amerika Serikat dan sekutunya disertai teror penyanderaan dan pemenggalan kepala sandera, serta teror bom mobil.

4. Kasus Chechnya versus Rusia

Penduduk Chechnya yang pada umumnya beragama Islam ingin melepaskan diri dari Rusia dengan melakukan perlawanan bersenjata terhadap Rusia. Perlawanan bersenjata ini seringkali disertai dengan penyanderaan dan teror bom di daerah Rusia sampai ke ibukota Moskow.

Walaupun telah banyak menelan korban jiwa dan harta benda di kedua belah pihak, konflik ini masih belum dapat diatasi.

5. Kasus Palestina versus Israel

Konflik rakyat Palestina dengan Israel sudah dimulai sejak berdirinya negara Yahudi: Israel, yang menggusur sebagian besar rakyat Palestina. Pada awalnya negara-negara Arab seperti Mesir, Syria, Yordania, dan Lebanon bersimpati terhadap rakyat Palestina, dan membantu memerangi Israel. Namun akibat serangan balasan dan tekanan Israel yang didukung oleh Amerika Serikat, maka negara-negara Arab tersebut kemudian memilih berdamai dengan Israel.

Rakyat Palestina terus mengadakan perlawanan terhadap gempuran tentara Israel yang terus mendesak masuk ke daerah Palestina. Menghadapi kekuatan lawan yang lebih kuat ini, rakyat

Palestina terutama faksi-faksi garis keras melakukan tindakan teror bom terhadap Israel. Pemuda remaja laki-laki dan perempuan banyak yang direkrut untuk pelaku bom bunuh diri. Sementara itu Israel juga membalas teror pembunuhan tokoh-tokoh pemimpin Palestina dengan menggunakan peluru kendali yang diluncurkan dari pesawat helikopter.

Konsepsi Penanggulangan Teror Bom

1. Analisis terhadap teror bom

Dari hasil pengamatan terhadap teror, khususnya teror bom di dalam negeri maupun yang terjadi di berbagai negara lain, beserta cara penanggulangannya dapat ditarik beberapa kesimpulan umum sebagai berikut:

a. Teror pada umumnya, khususnya teror bom digunakan sebagai salah satu jenis operasi oleh salah satu atau kedua belah pihak yang sedang konflik dengan menghalalkan segala cara tanpa menaati ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Hak Asasi Manusia (HAM).

b. Teror bom dapat terjadi apabila terdapat peluang dalam suatu masyarakat atau negara sasaran, antara lain: (1) lemahnya Aparat Penegak Hukum dan Aparat Keamanan pada umum-

nya; (2) banyaknya daerah-daerah *remote area* (kurangnya penguasaan dan pengawasan pemerintah); (3) masyarakat kurang berpartisipasi dalam menanggulangi teror bom, bahkan ada sebagian warga masyarakat yang membantu/melindungi para teroris; (4) sarana yang digunakan untuk melakukan teror semakin canggih dan memiliki daya penghancur dan perusak yang besar; (5) teror bom cenderung dilakukan oleh pelaku bom bunuh diri; (6) seringkali teror bom disertai dengan penyanderaan personil sipil yang tidak terlibat dalam konflik.

Kesimpulan tersebut di atas juga valid untuk teror bom yang terjadi di Indonesia. Pelaku teror bom di Indonesia, kecuali di Ambon/Maluku dapat dikelompokkan sebagai berikut: (a) jaringan Al Qaeda-Jemaah Islamiyah (teror kelompok Dr. Azahari); (b) jaringan Gerakan Aceh Merdeka (GAM); (c) jaringan MNLF dan sisa-sisa pengaruh DI/TII di Sulawesi dan (d) lain-lain.

Kelompok-kelompok tersebut dapat melakukan operasi berdiri sendiri, ataupun saling bekerja sama. Mereka selalu memanfaatkan segala peluang yang sangat banyak dalam NKRI.

2. Analisis terhadap penanggulangan teror bom

Dari berbagai kasus teror bom yang terjadi di luar negeri, pada awalnya selalu digunakan tindakan represif dengan operasi militer dan penegakan hukum. Konflik dapat berlangsung lama, bahkan sampai saat ini masih ada yang terus berlangsung, seperti di Palestina/Israel, Chechnya/Rusia dan di Irak. Hanya sedikit kasus teror bom yang dapat diselesaikan melalui perundingan damai (solusi non militer), antara lain kasus Irlandia Utara.

Penanggulangan teror di Indonesia sejak tahun 1950-an sampai pertengahan tahun 1980-an dilakukan dengan operasi militer yang meliputi: (a) Operasi Intelijen: penyelidikan; pengamanan; dan penggalangan terhadap tokoh-tokoh masyarakat kharismatis; (b) Operasi Teritorial, guna mendapatkan simpati rakyat agar berpihak kepada pemerintah; (c) Operasi Tempur Anti Teror untuk menghancurkan kelompok teroris garis keras (*die hard*); (d) Operasi Kamtibmas oleh Polri dalam rangka penegakan hukum dan mewujudkan ketentraman masyarakat; (e) Aparat Pemerintahan lainnya memberikan dukungan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Setelah era reformasi, Polri dipisahkan dengan TNI secara organisatoris. Penanggulangan teror dalam tertib sipil merupakan tugas dari Polri, TNI tidak boleh turut campur kalau tidak diminta oleh Polri, kecuali pada keadaan darurat sipil/militer/perang yang dinyatakan oleh Presiden.

Dalam situasi tertib sipil seperti yang diuraikan di atas banyak terjadi celah-celah (*gaps*) dan peluang bagi gerakan teror untuk melakukan aksinya, sehingga sulit untuk dilacak dan ditangkap oleh Polri. Celah-celah (*gaps*) tersebut antara lain adalah masih lemahnya operasi intelijen penyelidikan, hampir tidak ada operasi penggalangan terhadap tokoh-tokoh masyarakat kharismatis, tidak ada operasi territorial dalam keadaan tertib sipil, sehingga partisipasi masyarakat sangat kurang. Di samping itu penanganan masalah kemiskinan, kebodohan dan pengangguran, serta ekstrimitas agama masih belum menunjukkan hasil yang memadai. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan teror masih sangat kurang, cenderung pasif, bahkan ada yang memberikan bantuan kepada teroris.

Dalam rangka menanggulangi ancaman teror bom, seyogyanya pemerintah dapat memanfaatkan segenap Aparat Pe-

merintah, Polri dan TNI secara optimal dalam keadaan tertib sipil. Apabila keadaan tidak memungkinkan untuk dapat segera mengatasi ancaman teror bom, seyogyanya pemerintah tanpa ragu-ragu menyatakan keadaan darurat sipil, bahkan bila perlu darurat militer untuk suatu daerah tertentu, atau berlaku untuk seluruh wilayah nasional. Bilamana keadaan stabilitas keamanan sudah mulai mantap, secara bertahap dikembalikan ke keadaan tertib sipil.

Dari hasil pengamatan pada ± 5 tahun terakhir ini terjadi penanggulangan teror yang tidak efektif pada keadaan tertib sipil dan darurat sipil, akibat terjadinya celah-celah (*gaps*) dalam operasi intelijen penyelidikan dan penggalangan. Untuk mengatasi hal ini kewenangan dan peranan Badan Intelijen Negara (BIN) perlu ditingkatkan. Unsur/satuan intelijen dari TNI bila perlu diperbantukan/BKO kepada BIN atau Polri, demi suksesnya pencegahan dan penanggulangan ancaman teror bom. Peranan pembinaan territorial dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan kewaspadaan masyarakat dilakukan secara sungguh-sungguh oleh segenap Aparat Pemerintah. Warga masyarakat diberikan kesadaran untuk tidak membantu/melindungi teroris.

Di samping itu terhadap kaum separatis terus diupayakan solusi politik seperti amnesti dan ditawarkan juga agar mereka mau menempuh jalur demokrasi dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila.

Terhadap teroris dan gerakan separatis garis keras (*die hard*) harus dihancurkan dengan kesatuan anti teror dan kesatuan tempur anti gerilya dengan dukungan peralatan dan logistik yang memadai. Dalam hal ini keadaan perlu dinyatakan dalam keadaan darurat militer bagi daerah tertentu sebagai daerah penghancuran.

Penutup

Demikianlah sekedar sum-bangan pemikiran penulis, khususnya bagi pihak-pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan nasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan teror, khususnya teror bom di Indonesia.

Penanggulangan teror bom bukan hanya tugas Polri dan TNI serta Aparat Intelijen, tetapi juga merupakan tugas dari segenap Aparat Pemerintah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan tokoh-tokoh masyarakat. Penanggulangan teror bom harus dilakukan secara preventif, persuasif, dan represif meliputi segenap aspek kehidupan nasional, dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara serasi.